

**MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
SWASTA (SMAS) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI
KOTA SURAKARTA
(STUDI KASUS PADA SMA WARGA DAN SMAN 7 SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.**

Oleh :

Nunuk Nugraheni Lestari

A210130069

**PROGRAM STUDI PENDIDIDKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
SWASTA (SMAS) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
DI KOTA SURAKARTA
(STUDI KASUS PADA SMA WARGA DAN SMAN 7 SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

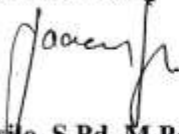
Oleh:

NUNUK NUGRAHENI LESTARI

A2101300069

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Agus Susilo, S.Pd, M.Pd

NIDN: 06-2504-8901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA
(SMAS) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
DI KOTA SURAKARTA
(STUDI KASUS PADA SMA WARGA DAN SMAN 7 SURAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nunuk Nugraheni Lestari

A210 130 069

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari Kamis, 19 Oktober 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji:

1. Agus Susilo, S.Pd, M.Pd
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Sabar Narimo, MM, M.Pd
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Prof. Dr. Harsono, SU
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Surakarta, 19 Oktober 2017

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

Dekan,



Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum.

NIDN. 0028046501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Agustus 2017

Penulis



Nunuk Nugraheni Lestari

A210130069

MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH (Studi Kasus Pada SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui perencanaan dan pengelolaan keuangan di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta; 2) Untuk mengetahui realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta; 3) Untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif. Bila ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini menggunakan strategi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan triangulasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan Rencana Anggaran Keuangan Sekolah disesuaikan dengan jenis dana yang dimiliki oleh sekolah yang harus diutamakan untuk kegiatan penting yang terkait dengan siswa seperti kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar yang mencakup renovasi gedung, alat alat untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan hal lainnya yang mendukung peningkatan mutu sekolah. (2) Proses pengelolaan keuangan sekolah yakni mencari sumber dana terlebih dahulu dan penggunaan dana yang disesuaikan dengan jenis anggaran. selanjutnya tahapan proses pengawasan penggunaan dana dan evaluasi yang memungkinkan dana digunakan secara efektif oleh sekolah. tahapan pertanggungjawaban, membuktikan bahwa sekolah telah bertanggungjawab secara maksimal dari sumber dana yang digunakan secara efisien. (3) Sanksi diberikan kepada sekolah, apabila dana yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. (4) Sekolah tidak pernah mengalami defisit keuangan, karena dana telah disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kebutuhan yang lebih penting diprioritaskan terlebih dahulu. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Proses keuangan sekolah di kedua sekolah tersebut kurang menerapkan PSAK 45. (2) Pengelolaan Keuangan DI sman 7 Surakarta lebih terbuka kepada masyarakat mengenai perincian keseluruhan dana yang digunakan, karena dikhawatirkan adanya tuduhan penyelewengan dana. (3) Karena bersifat central, untuk informasi penggunaan dana juga disampaikan kepada orang tua siswa namun ada batasan tertentu, karena yang mengkoordinir keseluruhan adalah yayasan. (4) SMA warga bukan termasuk dalam organisasi nirlaba menurut PSAK 45, sebagaimana sekolah yang dikelola oleh swasta, dana dari sekolah ke yayasan ditekan seminimal mungkin, sehingga penunjang terbesar kegiatan penyelenggaraan pendidikan adalah BOS.

Kata Kunci : Pengelolaan, Realisasi Anggaran, Kondisi Pengelolaan

Abstract

The purpose of this research are: 1) To know the planning and financial management at Senior High School Citizens and Senior High School 7 Surakarta; 2) To find out the realization of budget in school financial management at Senior High School Citizens and Senior High School 7 Surakarta; 3) To know the condition of financial management at Senior High School Citizens and Senior High School 7 Surakarta. In accordance with the purpose of research, the research using qualitative research methods comparative. When viewed from the aspect studied, this research using research strategy. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Validity of data by using triangulation, while data analysis technique used is interactive analysis technique. The results of the research are as follows: (1) Preparation of the School Finance Budget Plan is tailored to the type of funds and funds held by the school and should be prioritized for important activities related to students such as the need for teaching and learning activities covering the renovation of buildings, tools to support learning activities and other things that support the improvement of school quality . (2)The process of school financial management is to find the source of funds in advance and the use of funds tailored to the type of budget. the next stage of the process of monitoring the use of funds and evaluation that allows funds to be used effectively by the school. stages of accountability, proving that the school has been fully responsible from the source of funds used efficiently.(3) Sanctions are granted to schools, if the funds used are not in accordance with the rules set by the government.(4) Schools have never experienced a financial deficit, as funds have been adjusted to pre-made plans. More important needs are prioritized first. The conclusions of this study are (1) The financial process of the schools in both schools is less to apply PSAK 45. (2) Financial Management in SMAN 7 Surakarta is more open to the public regarding the overall details of the funds used, due to concerns about allegations of misappropriation of funds. (3) Because it is central, information on the use of funds is also submitted to parents but there are certain limitations, because the overall coordinating is the foundation. (4) High school citizens are not included in non-profit organizations under PSAK 45, as is a private-run school, funding from schools to foundations is kept to a minimum, so that the biggest support of education activities is BOS.

Keywords: *Management, Budget Realization, Condition of Management*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan suatu kegiatan yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi lembaga formal tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena posisi keuangan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Manajemen keuangan harus dikelola dengan baik karena terkait dengan hubungan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, sehingga dalam pengelolaan dana dapat diterapkan dengan secara profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan sekolah sebenarnya sudah diterapkan dengan baik, hanya saja kadar tingkatan pelaksanaannya berbeda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Keragaman permasalahan pengelolaan keuangan sekolah tergantung pada kondisi fisik sekolah, kondisi geografis sekolah dan citra sekolah. Sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat pengelolaan keuangannya berbeda jauh dengan sekolah yang kurang diminati oleh masyarakat, karena sekolah harus mampu menampung keseluruhan kegiatan yang semakin banyak yang dituntut oleh masyarakat.

Banyak sekolah yang kurang terbuka terhadap sistem pengelolaan sekolah kepada masyarakat sehingga berakibat banyaknya tuduhan penyelewengan dana terhadap sekolah. Orang tua siswa mengeluhkan banyaknya biaya pembayaran sekolah dan terkesan mahal tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pungutan dana sekolah. Masyarakat terkadang menilai bahwa biaya sekolah terlalu berat untuk dipenuhi, bahkan bagi masyarakat tidak mampu. pendidikan bukan lagi sebagai kebutuhan primer dengan biaya yang terjangkau. . Berbagai macam pungutan liar kerap kali terjadi di sekolah dengan berbagai macam pungutan dana yang tidak masuk akal. Diantara alasan yang sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan tersebut antara lain, demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas, yang melibatkan *stakeholders* sekolah demi melancarkan aksi tersebut. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari upaya mencapai standar mutu pendidikan yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang gerak yang luas bagi lembaga pendidikan dalam berkreasi guna menunjukkan eksistensinya di tingkat nasional (Rahmatullah Nabila Z 2013 : 4).

Tugas pengelola pendidikan menjadi sangat berat dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang harus dipublikasikan di media, demikian pula dalam memutuskan besaran biaya pendidikan kepada peserta didik harus dikomunikasikan kepada orang tua, karena mekanisme ini sangat baik dalam rangka menjaga akuntabilitas akademik maupun non akademik. Terkait hal tersebut, dibutuhkan model yang memadai dalam penyampaian informasi keuangan sekolah kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan permasalahan, teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS PADA SMA WARGA DAN SMAN 7 SURAKARTA)**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan sub penelitian naturalistik dimana pengumpulan data dilakukan secara induktif, sehingga hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Siklus penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penyusunan laporan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dua semester yaitu sejak bulan September 2016 sampai agustus 2017. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara sekolah dan pihak lain yang terkait dengan prosedur pengelolaan keuangan sekolah. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data yang meliputi: (1) Pengumpulan dokumen berdasarkan kriteria tertentu yang dibangun sesuai dengan kepentingan penelitian (2) Melakukan suatu pengamatan dengan mencatat apa yang dilihat dan apa yang

dimengerti terhadap suatu kejadian. (3) Peneliti melakukan pendekatan kepada narasumber secara terbuka, bersamaan itu dilaksanakan pencatatan hal penting dari suatu wawancara sesuai kebutuhan. (4) Pengelompokan data hendaknya ditulis dalam kartu kecil untuk memudahkan melaksanakan olah data. (5) Data yang valid dari hasil pengamatan diperbandingkan dengan pola yang sama.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta

3.1.1 Perencanaan Keuangan sekolah

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait dengan perencanaan keuangan sekolah pada SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta bahwa hal yang pertama dilakukan adalah mengadakan suatu rapat untuk membahas suatu tujuan strategis untuk jangka waktu tertentu. Penyusunan RAKS dilakukan oleh komponen sekolah seperti Kepala Sekolah, Guru, bendahara, perwakilan dari salah satu guru serta yayasan untuk sekolah yang bertatus swasta dengan didasarkan pada suatu kebutuhan untuk jangka waktu satu tahun. Dalam penyusunan RAKS disesuaikan dengan jenis dana dan dana yang dimiliki oleh sekolah dan harus diutamakan untuk kegiatan penting yang terkait dengan siswa seperti kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar yang mencakup renovasi gedung, alat alat untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan hal lainnya yang mendukung peningkatan mutu sekolah. Perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah satu tahun mendatang juga dikordinasikan dengan orang tua siswa mengenai kegiatan yang akan direalisasikan, sehingga memunculkan besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk sumbangan sekolah yang nantinya untuk menunjang kebutuhan siswa itu sendiri.

3.1.2 Pengelolaan Keuangan Sekolah

3.1.2.1 Strategi Mencari Sumber Dana

Setelah RAKS sudah mendapatkan persetujuan maka kegiatan selanjutnya adalah mengelola keuangan dari sumber dana yang sudah ada sebelumnya, kemudian direalisasikan untuk kegiatan yang sudah tercantum dalam perencanaan. Sumber dana berasal dari internal dan eksternal, sumber dana internal berasal dari SPP bulanan siswa sedangkan eksternal berasal dari sumbangan alumni, BOS, sumbangan pemerintah daerah dan sumbangan pengembangan sekolah. Sumbangan Pengembangan Sekolah bersifat tidak wajib, bagi siswa yang tidak mampu tidak berkewajiban untuk membayar dengan syarat harus melampirkan surat keterangan tidak mampu kepada sekolah. Besaran sumbangan pengembangan sekolah untuk kedua sekolah tersebut sebesar 3.500.000 yang dibayarkan sekali dan boleh diangsur ketika siswa sudah diterima menjadi peserta didik.

Pengelolaan Dana BOS harus dikelola oleh sekolah itu sendiri tidak boleh ada campur tangan dari yayasan apabila sekolah tersebut berstatus swasta, nantinya dalam pembuatan laporan keuangan akan kesulitan, sebab yang mengetahui apa yang diperlukan dan dibutuhkan adalah sekolah itu sendiri. Dana BOS untuk sekolah swasta bersifat hibah, Pemerintah tidak membedakan sekolah negeri dan swasta dalam pemberian dana BOS karena keberadaan sekolah yang berstatus berbeda sama dalam tujuan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Besar dana yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan besaran Rp. 1.400.000/tahun dengan waktu penyaluran dilakukan setiap periode tiga bulanan. Untuk biaya SPP di SMA Warga sebesar Rp. 450.000 sedangkan di SMAN 7 Surakarta

berkisar Rp. 250.000, untuk siswa yang kurang mampu tidak dipungut biaya sama sekali dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

3.1.2.2 Penggunaan Dana

Penggunaan dana yang baik harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak terjadi tumpah tindih kebutuhan sehingga dana yang sudah direncanakan dapat direalisasikan. Penggunaan dana BOS harus efisien yang didasarkan pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena ada kebutuhan yang tidak boleh didanai dengan menggunakan dana BOS yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dengan jenis seperti pengadaan buku pelajaran, pembiayaan satuan pendidikan, pengadaan alat habis pakai, kegiatan magang siswa dan sebagainya yang berkenaan dengan kegiatan sekolah yang menyangkut guru dan siswa.

3.1.2.3 Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mampu mencegah timbulnya penyimpangan dalam suatu pelaksanaan kegiatan pendidikan, sehingga sumber daya dapat digunakan dengan cara efektif dan efisien dan dapat menekan timbulnya suatu kerugian. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal, pihak internal terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah sedangkan eksternal dilakukan oleh pemerintah yakni dinas pendidikan dan Inspektorat Pusat. Internal bersifat independen yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan pendidikan, berbeda dengan dinas pendidikan yang menerima

laporan keuangan dari sekolah mengenai kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun mendatang, dengan pengawasan langsung mendadak setiap tahun yang dilakukan oleh inspektorat pusat dan memeriksa secara menyeluruh seperti RAKS, kondisi kinerja pegawai dan lainnya.

Peneliti juga menemukan bahwa evaluasi di kedua sekolah tersebut dilakukan setiap satu tahun sekali dengan keterlibatan panitia penyusun RAKS, kemudian menganalisis program yang akan dijalankan, dilakukan pengecekan dan membandingkan dengan anggaran. Komite bertugas sebagai pengumpul bukti transaksi yang nantinya akan dibuat laporan pertanggungjawaban, kemudian dianalisis kelemahan dan kelebihan dari program yang telah dilaksanakan, agar kegiatan atau program yang berjalan selanjutnya tidak terjadi kendala.

3.1.3 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh kepala sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana, misalnya sumbangan pengembangan sekolah yang akan dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah dan orang tua siswa.

Begitu pula dana yang bersumber dari pihak yayasan maka akan dipertanggungjawabkan kepada yayasan. Pertanggungjawaban bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan sesuai rencana, pembelanjaan dilakukan dengan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sehingga tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak lain tanpa suatu persetujuan.

3.2 Realisasi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan sekolah

3.2.1 SMA Warga

Realisasi anggaran sudah mengacu pada keputusan mendikbud No. 0293/U/1993 dengan prosentase 75% digunakan untuk gaji, tunjangan jansostek, tunjangan hari raya, honor keamanan. Sedangkan 25% digunakan untuk operasional sekolah seperti pembiayaan pendidikan, kantor, umum, perjalanan atau dinas dan sebagainya. Apabila penggunaan dana menyelewengkan maka ada sanksi yang berat bagi pelanggarnya, seperti sanksi kepegawaian, proses hukum, pemblokiran dana dan penghentian sementara.

3.2.2 SMAN 7 Surakarta

Dana yang dikelola oleh bendahara direalisasikan dengan mengacu pada keputusan Mendikbud No. 0293/U/1993, dengan tata kelola anggaran yakni membuat surat pertanggungjawaban dana yang sudah digunakan. Pelaporan dilakukan 3 bulan sekali yang harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

3.3 Kondisi Pengelolaan Keuangan di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta yang terkait dengan kondisi pengelolaan keuangan sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.3.1 SMA Warga

Dalam membuat suatu perencanaan harus dikordinasikan terlebih dahulu dengan yayasan, mengingat SMA Warga adalah sekolah yang berada di bawah naungan yayasan, jadi segala keputusan menjadi suatu pertimbangan yayasan. Sekolah mendapatkan sumber dana dari SPP bulanan, BOS, Sumbangan Alumni, Sumbangan pengembangan sekolah. Beberapa sumbangan yang masuk, BOS adalah sumbangan yang paling menunjang kebutuhan sekolah, mengingat yayasan hanya memberikan dana sebesar Rp. 5.000.000 per tahun untuk kebutuhan

sekolah. Apabila sekolah merasa tidak tercukupi, sekolah bisa membuat suatu perencanaan dengan mengajukan proposal kegiatan dana yang ditujukan yayasan, apabila yayasan merasa kegiatan itu perlu untuk dilaksanakan, maka yayasan akan menyetujui dan dana akan cair.

Pengelolaan sekolah di SMA Warga dikelola oleh bendahara tunggal yang hanya menerima dan mencatat dana yang masuk maupun keluar. Mengumpulkan bukti bukti transaksi, melakukan pencatatan, kemudian dibukukan dan selanjutnya dilaporkan kepada yayasan untuk pengelolaan selanjutnya, karena pengelolaan keuangan di SMA Warga bersifat central atau terpusat dengan tetap menjaga privasi. SMA Warga belum pernah mengalami defisit keuangan karena dana yang dianggarkan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, apabila dana yang dimiliki minim maka akan direalisasikan untuk kegiatan yang lebih penting dan kegiatan lainya menunggu dana terkumpul terlebih dahulu.

3.3.2 SMAN 7 Surakarta

Kondisi pengelolaan keuangan sekolah di SMAN 7 Surakarta tidak pernah mengalami defisit keuangan, karena tanpa adanya keputusan oleh kepala sekolah bendahara tidak berani mengeluarkan uang. Terkadang dana yang digunakan juga mengalami kendala, karena ada kebutuhan yang mendesak yang memungkinkan harus dipenuhi terlebih dahulu. Seperti pembiayaan dalam Ujian Nasional yang dikelola oleh komite mengalami peledakan dana dan harus menggeser kebutuhan lainya.

Selama ini dalam proses audit internal dan ekstrenal tidak pernah mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Karena dana yang dikelola sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam menginformasikan dana kepada masyarakat cenderung terbuka sekali karena murni bebas dari penyelewengan. Pengelolaan dana

dilakukan dengan mengumpulkan bukti transaksi kemudian diinput melalui sistem komputerisasi. Bendahara harus membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala Sekolah, kemudian Kepala Sekolah melakukan pengecekan pelaporan tersebut.

Mengacu pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ummu Salamah (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Kholidin dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing jajarannya, walaupun pada prosesnya diikuti dan diawasi dan disahkan oleh Kiayi Pondok Pesantren Al-Kholidin. Pelaporan keuangan pondok pesantren Al-Kholidin dilakukan setiap bulan, semester dan tahunan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Salamah bahwa pengelolaan keuangan di lembaga sekolah berbasis islam diikuti dan diawasi oleh Kiayi Pondok Pesantren sedangkan pengelolaan keuangan di SMA Warga dan SMAN 7 diawasi oleh yayasan dan pemerintah. Persamaan penelitian ini yaitu perencanaan keuangan dilakukan oleh Kepala Sekolah beserta jajarannya (wakil kepala sekolah, bendahara dan waka dari berbagai bidang).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2013), hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan RAKS dilakukan oleh bagian keuangan dan tidak semua guru dilibatkan, hanya direktur perguruan, ketua yayasan, kepala sekolah bagian kesiswaan dan ketua jurusan. Penggunaan pembiayaan pendidikan ditinjau dari sisi keuangan, mengingat jumlah pemasukan yang terbatas. Setiap pengeluaran harus disetujui oleh direktur yayasan dan bagian keuangan sekolah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa proses penyusunan RAKS sekolah swasta dilakukan oleh Kepala Sekolah, Bendahara perwakilan dari berbagai bidang dan yayasan. Penggunaan

pembiayaan pendidikan ditinjau dari sisi keuangan, mengingat jumlah pemasukan yang terbatas dari pihak yayasan, sehingga pengeluaran harus disetujui oleh direktur yayasan, kepala yayasan dan bagian keuangan sekolah.

Mengacu pada penelitian Afriliana Fitri (2014) hasil dari penelitian tersebut bahwa pengelolaan dana BOS berpedoman kepada RAKS yang telah ditetapkan. Ini berarti pengelola benar-benar melakukan penggunaan dana sesuai dengan rencana, sehingga pengelola tidak mengada-ngada penggunaan dana BOS. Persamaan penelitian ini dengan Afriliana Fitri yaitu bahwa pengelolaan dana BOS secara apa adanya berpedoman pada RAKS dan sesuai rencana dengan melihat dana yang dimiliki.

Mengacu pada penelitian Kusno Masluyah Suib Wahyudi (2015) hasil dari penelitian tersebut bahwa pengeluaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sumber dana. Persamaan penelitian ini dengan Kusno Masluyah Suib Wahyudi yaitu setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan yang telah disesuaikan dengan RAKS sehingga sangat dimungkinkan suatu program dibiayai oleh subsidi silang.

Mengacu pada penelitian Dewi Arianti (2014) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan di MAN Insan Cendekia Serpong dilaksanakan dengan sangat baik. Proses manajemen diawali pada proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Persamaan penelitian ini dengan Dewi Arianti yaitu proses pengelolaan keuangan sekolah di kedua sekolah tersebut secara garis besar sama, yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Namun dalam penelitian ini penulis tidak memaparkan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban dalam kedua sekolah yang berbeda status tersebut pada dasarnya sama yakni Kepala sekolah, Bendahara dan Komite.

Mengacu pada penelitian Ufifatul Ilma (2015) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa SMKN 5 Malang mewujudkan keterbukaan atau transparansi sekolah dengan mengadakan forum atau pertemuan rutin wali murid setiap akhir tahun untuk melaporkan keuangan sekolah dalam setahun. Persamaan penelitian ini dengan Ufifatul Ilma adalah kedua sekolah tersebut yakni SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta menganut prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem dan prosedur yang sudah sesuai dengan pedoman dan laporan yang jelas, secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta mengenai model pengelolaan keuangan sekolah dapat diambil kesimpulan bahwa : (1) Proses keuangan sekolah di kedua sekolah tersebut kurang menerapkan PSAK 45. (2) Pengelolaan Keuangan di SMAN 7 Surakarta lebih terbuka kepada masyarakat mengenai perincian keseluruhan dana yang digunakan, karena dikhawatirkan adanya tuduhan penyelewengan dana. (3) Karena bersifat central, untuk informasi penggunaan dana juga disampaikan kepada orang tua siswa namun ada batasan tertentu, karena yang mengkoordinir keseluruhan adalah yayasan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah di SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Walaupun audit tidak dilakukan secara rutin di SMA Warga, tidak pernah terjadi penyelewengan dana terhadap pengurus keuangan manual sekolah. Sehingga Pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah di SMA Warga dan SMAN 7

Surakarta dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dan peningkatan mutu sekolah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai penunjang untuk melakukan penelitian yang serupa dan dapat digunakan oleh sekolah lain sebagai bahan kajian untuk mengimplementasikan proses pengelolaan keuangan sekolah di SMA swasta dan negeri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan secara umum. Rincian dan implikasi yang telah peneliti uraikan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut : (1) Wali murid SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta diharapkan mampu membayar biaya sekolah tepat waktu setiap bulanya. (2) SMA Warga seharusnya lebih meningkatkan pemeriksaan keuangan sekolah, pemeriksaan minimal diadakan sebulan sekali untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana sekolah. (3) Kepala sekolah SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta hendaknya lebih turut ikut campur dalam masalah tunggakan SPP dan sumbangan pengembangan sekolah, agar tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. (4) SMA Warga seharusnya membentuk 2 bendahara manual lagi untuk mengelola jenis dana yang berbeda dikarenakan menjadi bendahara tunggal sekolah merupakan tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan. (5) Keuangan SMA Warga seharusnya lebih *open public* agar masyarakat tidak terjadi kekhawatiran terhadap pungutan liar. (6) Bendahara SMA Warga dan SMAN 7 Surakarta lebih meningkatkan sistem kinerja yang sudah baik dengan memberikan pelayanan dan kenyamanan yang baik bagi siswa – siswanya

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, dkk. 2015. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Anwar, Moch.Idochi. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boy, Denny.”*Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Partisipasi Orang*

- Tua Murid*”.*Dalam Jurnal Ekonomi Bisnis*.Volume 14 No 12. Hal 79-87.
Depok : Universitas Gunadarma.
- Fitri, Afriliana. “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan KotaBukittinggi”.*Dalam Jurnal Admunistrasi Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1. Hal 34-831. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Handayani, Dina. 2008. “*Peranan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kabupaten Padeglang*”. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Ilma, Ulifatul. 2015. “Akuntabilitas Keuangan Sekolah Berbasis Audit Keuangan”.
Dalam Jurnal Manajemen Pendidikan.Volume 24 Nomor 6. Hal 563 – 570.
Malang: Universitas Negeri Malang.
- Martin.2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtiyasa, Budi, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2017.*Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2017*. Jakarta: Dirjen Dikdas.
- Raeni.2014. “*Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Produktivitas SMK (Kajian Persepsi Guru SMK Se-Kabupaten Kendal)*”.Skripsi. Semarang: Jurusan Pendidikan Ekonomi: Universitas Negeri Semarang.
- Robandi, Imam. 2008. *Becoming The Winner*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rudiyanto. 2010. “ *Manajemen Pembiayaan Dalam Penyelenggaraan Anak Usia Dini*”. *Dalam Jurnal Manajerial*. Volume 9 No 17. Hal 55 – 62. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- : Magister Ekonomi Pembangunan: Universitas Sebelas Maret.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian (Kualitatif & Kuantitatif)*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Utama, Daniel Aditya. 2013. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri Eks-RSBI Se Kota Semarang". *Dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*. Volume 11 No 2. Hal 100-114. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Wibowo, Agus. 2013. *Akuntabilitas Pendidikan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Windarti. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada SMA dan SMK Negeri Di Kota Madiun". *Dalam Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 4 Nomor 1. Hal 23-36. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.